

Media Online	Radarsolo.jawapos.com
Tanggal	16 April 2023
Wilayah	Kabupaten Sragen



## Wakil Ketua DPRD Sragen Ajukan Rp 1,5 M untuk Seragam Gratis Sekolah

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/16/04/2023/wakil-ketua-dprd-sragen-ajukan-rp-15-m-untuk-seragam-gratis-sekolah/>

**RADARSRAGEN.COM** – Wakil Ketua DPRD Sragen Pujono Elly Bayu Effendi mendapat banyak keluhan dari warga kurang mampu. Ini terkait kesulitan mereka dalam membeli seragam sekolah. Pihaknya akhirnya mendesak ada kepedulian dan kepekaan dari Pemkab Sragen terkait kondisi warganya.

Politisi Fraksi Partai Golkar mengakui, akhirnya kembali menganggarkan bantuan seragam gratis bagi siswa-siswi SMP miskin atau yang kurang mampu ke dalam anggaran APBD 2023. Usulan terkait penganggaran seragam diharapkan disetujui oleh Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dengan total anggaran Rp 1,5 miliar.

ini menjelaskan, untuk tahun ini, fraksi Golkar memang kembali mengusulkan anggaran untuk seragam gratis.

"Kami dari partai pengusung bupati, juga punya hak untuk menyampaikan ini ke bupati. Apalagi program ini siswa-siswi di Sragen yang kurang mampu," terangnya.

Dia menjelaskan anggaran tersebut untuk siswa di 75 sekolah SMP negeri maupun swasta di Sragen. Nilai anggaran mencapai Rp 1,5 miliar yang diharapkan bisa direalisasikan menjadi seragam gratis untuk 10 ribu siswa kurang mampu.

"Kami sangat berharap kepada bupati Sragen untuk menyetujui usulan untuk ditindaklanjuti, dengan harapan seragam gratis bagi siswa yang kurang mampu bisa berkelanjutan setiap tahun," ujarnya.

Bayu menyampaikan anggaran seragam gratis ini, selain membantu bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Seragam yang layak berperan untuk kemajuan pendidikan anak. Yang kelak bisa menjadi tokoh masyarakat maupun pejabat negara.

Dia menjelaskan program seragam gratis siswa SMP kurang mampu ini telah diprakarsai oleh Partai Golkar dalam anggaran APBD 2022. Program seragam gratis itu dianggarkan sebesar Rp 1,5 miliar bagi 8.977 siswa tingkat SMP. "Agar tepat sasaran, disesuaikan dengan data kemiskinan yang dimiliki pemerintah," ujarnya.

(din/nik/dam)